

IKLIM BELAJAR DEMOKRATIS DALAM PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR

Desi Ratnasari

Universitas Sebelas Maret
deade.ratna@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan suasana demokrasi ruang kelas sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah. Kuesioner dibagikan kepada 72 guru dan 1380 siswa dari 12 sekolah dasar. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) iklim demokratis tingkat moderat, (2) lebih banyak variasi iklim demokratis ditemukan di tingkat siswa dari pada tingkat sekolah, (3) faktor yang mempengaruhi iklim demokratis adalah *genre* siswa, tingkat pendidikan orang tua, pembelajaran keluarga dukungan, guru, tingkat pendidikan dan pengalaman mengajar guru, dan (4) sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah unggul dibandingkan dengan mereka yang tidak menerapkannya. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan rancangan hierarkis (*multilevel design*) berdasarkan asumsi dasar bahwa kondisi dan batas sosial, termasuk pendidikan. Hasil dari penelitian ini yaitu iklim demokratis di dalam kelas pada umumnya sedang-sedang saja, belum optimal tetapi tidak pula rendah. Namun demikian sekolah-sekolah yang menerapkan MBS menunjukkan skor yang agak lebih tinggi daripada sekolah lainnya.

Kata kunci: Demokratis, Manajemen Sekolah, Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Upaya memperbaiki mutu pendidikan merupakan salah satu fokus penting pembangunan yang tidak luput dari masalah (Creemers, 2000; Darmaningtyas, 1999; Iskandar, 2000). Berbagai masalah yang tidak diharapkan terjadi di lingkungan sekolah. Masalah-masalah itu misalnya hubungan yang kurang harmonis (konflik) di kalangan siswa, guru, dan kepala sekolah; lingkungan fisik sekolah yang kurang bersih, kurang indah, kurang memadai; kemerosotan disiplin sekolah; pemanipulasian nilai dan pengomersialisasian jabatan oleh para personalia sekolah; manajemen tertutup dengan laporan yang “baikbaik” semata; serta hubungan antara personalia sekolah, siswa dan masyarakat yang kurang serasi. Masalah tersebut semakin diperparah oleh kondisi krisis ekonomi sosial yang sedang dialami negara ini.

Krisis ekonomi sosial tersebut, yang dirasakan sejak 1997, memicu pemikiran penyelamatan bangsa yang direkomendasikan oleh Bank Dunia (World Bank, 1998) dalam *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*, dan Propenas pada 1999 (lihat Jalal & Supriadi, 2001). Ketika situasi ekonomi bangsa belum ada tanda-tanda perbaikan, muncul gagasan baru untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Semuanya bermaksud menyelamatkan pendidikan dalam situasi kemelut nasional yang tidak menentu. Belajar dari pengalaman negara lain, salah satu resep yang ditawarkan sejalan dengan otonomi daerah adalah manajemen sekolah yang mandiri atau berbasis sekolah. MBS ditandai dengan otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa mengabaikan kebijakan

nasional. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.

Sekolah yang mandiri atau berdaya memiliki ciri-ciri: tingkat ketergantungan yang rendah, adaptif dan antisipatif/proaktif sekaligus memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil risiko, bertanggung jawab terhadap sekolah), memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada dirinya, dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. (Depdiknas, 2000; Samani, 2001).

Model MBS Indonesia mengasumsikan kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas pemerintah. Lima lingkup strategi yang ditawarkan adalah kurikulum yang inklusif, proses belajar mengajar yang efektif, lingkungan sekolah yang mendukung, sumber daya yang berbasis pemerataan, dan standarisasi proses monitoring, evaluasi dan tes. Kelima strategi tersebut menyatu ke dalam empat lingkup fungsi pengelolaan sekolah, yaitu manajemen/organisasi/kepemimpinan, proses belajar mengajar, sumber daya manusia dan administrasi sekolah.

Keunikan MBS di Sekolah Dasar adalah memadukan aspek pembelajaran dan partisipasi semua pihak terkait baik guru maupun masyarakat. Hal ini agak berbeda dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang digagas oleh pihak Depdiknas untuk sekolah menengah baik SLTP maupun SMU (Umaedi, 2001). Keunikan MBS di SD yaitu apabila terlaksana dengan optimal, maka akan tercermin suasana demokratis di lingkungan sekolah itu. Sampai saat ini,

belum terungkap bagaimana keadaan sebenarnya suasana demokratis tersebut setelah lebih dari setahun diberlakukannya MBS.

Tantangan dunia pendidikan ke depan adalah mewujudkan proses demokratisasi belajar, suatu proses pendemokratisasian yang mencerminkan bahwa belajar merupakan prakarsa anak. Demokratisasi belajar berisi pengakuan hak anak untuk melakukan tindakan belajar sesuai dengan karakteristiknya. Salah satu prasyarat masyarakat belajar yang demokratis adalah ada pengemasan pembelajaran yang beragam dengan cara menghapuskan penyeragaman kurikulum, strategi pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi (Degeng, 2001). Surakhmad (2001) mengisyaratkan iklim demokratis sebagai prasyarat keberhasilan MBS, sedangkan Degeng mengungkapkan demokratisasi sebagai perwujudan implementasi MBS.

Pembelajaran yang demokratis adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi dua arah antara guru dan siswa. Guru memberikan bahan pembelajaran dengan selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif memberikan reaksi; siswa dapat bertanya maupun memberi tanggapan kritis tanpa ada perasaan takut. Bahkan, kalau perlu, siswa diperbolehkan menyanggah informasi atau pendapat guru jika memang dia mempunyai informasi atau pendapat yang berbeda. Hasil belajar pada dasarnya merupakan hasil reaksi antara bahan pelajaran, pendapat guru, dan pengalaman siswa sendiri (Sadiyo, 2003).

Mulyoto (2002) mengemukakan tiga alasan mendesak pembelajaran yang demokratis diimplementasikan di kelas. Pertama, kenyataan bahwa guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Tidak dapat

dipungkiri dalam era globalisasi informasi teknologi, akses terhadap informasi menjadi begitu luas: televisi, radio, buku, koran, majalah, dan internet. Saat berada di kelas, siswa telah memiliki seperangkat pengalaman, pengetahuan, dan informasi. Semua ini dapat sesuai dengan bahan pelajaran atau dapat juga bertentangan. Pembelajaran yang demokratis memungkinkan terjadinya proses dialog yang berujung pada pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Tanpa demokrasi di kelas, guru akan menjadi penguasa tunggal yang tidak dapat diganggu gugat. Siswa terkekang, dan akhirnya potensi kreativitasnya tidak berkembang dengan baik.

Kedua, kompleksnya kehidupan yang akan dihadapi siswa setelah lulus. Mereka memiliki kemampuan menyesuaikan diri di masa depan. Prinsip belajar yang relevan adalah belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*). Artinya, di kelas target pembelajaran bukan sekadar penguasaan materi, melainkan siswa harus belajar juga bagaimana belajar (secara mandiri) untuk hal-hal lain. Ini dapat terjadi apabila dalam kegiatan pembelajaran siswa telah dibiasakan untuk berpikir mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan berani bereksperimen.

Ketiga, konteks pendidikan demokrasi masyarakat. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, siswa hendaknya sejak dini telah dibiasakan bersikap demokratis, bebas berpendapat tetapi tetap dalam *rule of the game*. Ini dapat dimulai di kelas dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang menekankan adanya demokrasi. Bagaimana mereka dapat diharapkan menjadi penyokong demokratisasi kalau di sekolah mereka tidak mendapatkan pengalaman berdemokrasi?.

Ada empat pola pendapat yang menghalangi demokratisasi belajar, yakni (1) benar atau salah adalah negara saya; (2) arus pasang menggoyang semua kapal; (3) hidup adalah perjuangan; (4) keputusan berdasarkan hierarki (Degeng, 2001). “*Benar atau salah adalah negara saya*”, adalah suatu pernyataan yang meletakkan kepentingan nasional di atas segalanya. Kebenaran akan dikalahkan oleh kepentingan nasional. Pernyataan ini akan mendorong orang untuk berjuang tanpa argumentasi yang memadai dan mengabaikan tumbuhnya keragaman antarpribadi di belahan bumi lain. Pernyataan ini akan mendorong orang untuk memusatkan potensi memperkuat keputusan-keputusan yang sentralistik, monolitik, dan uniformistik, dan secara sistematis menghentikan lajunya gerakan demokratisasi.

Arus pasang menggoyang semua kapal artinya sebagai bangsa secara nasional makmur, maka semua anggota masyarakat di mana pun berada, akan menikmati kemakmuran tersebut. Ini adalah suatu pernyataan yang secara potensial menutup peluang demokratisasi. Dukungan terhadap keragaman dan perlunya tindakan yang khas untuk kondisi tertentu sangat rendah. *Hidup adalah perjuangan*, artinya jika ingin selamat dan sukses, maka orang harus agresif dan berusaha memenangkan segala bentuk persaingan. Hukum rimba akan tampil dalam sosoknya yang utuh bagi pendukung mitos ini, dengan mengabaikan pentingnya kontribusi kolaborasi. Kolaborasi merupakan kemampuan yang sangat penting untuk ditumbuhkan ketika memasuki era demokratisasi belajar. *Keputusan berdasarkan hierarki*, artinya pimpinan adalah pembuat peraturan, pengesah peraturan, pengambil keputusan,

dan pemberi perintah kepada orang lain agar tercipta keadaan yang mereka inginkan. Selain para pemimpin, orang lain harus mematuhi peraturan yang disyahkan. Mitos ini sangat nyata menghambat upaya demokratisasi belajar.

Peningkatan mutu pendidikan dasar dapat dilakukan melalui MBS sesuai tuntutan desentralisasi pendidikan. MBS yang ditandai adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang meningkat, diharapkan dapat meningkatkan kreativitas para pengelola dan pelaksana pendidikan. Keleluasaan yang lebih longgar diberikan kepada sekolah sehingga lebih kreatif dalam mengelola sumberdaya dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas baik terhadap kebutuhan peserta didik, sekolah maupun lingkungan.

Empat pilar pendidikan yang dicanangkan UNESCO yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together* (Delors, 1997) merupakan hal yang harus menjiwai program-program kegiatan belajar mengajar di sekolah. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, maka pembelajaran di sekolah hendaknya mengaktifkan peserta didik tidak hanya secara fisik untuk menumbuhkan badan yang sehat, tetapi juga aktif secara mental sehingga mampu menjadi warga negara yang kritis, kreatif, dan partisipatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik sudah lama diperkenalkan, tetapi belum merata, sehingga hal ini sering menimbulkan salah pengertian dan keliru dalam penerapannya.

Gagasan pokok pembelajaran aktif yang berjiwa demokratis ialah mengerti tujuan dan fungsi belajar, mengenal anak sebagai individu, memanfaatkan organisasi kelas, mengembangkan kemampuan

berpikir dan memecahkan masalah, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, memberikan umpan balik yang baik, untuk meningkatkan kegiatan belajar, dan membedakan antara aktif fisik dan mental.

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini dibatasi pada iklim demokratis di dalam kelas, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan keunggulan SD MBS dalam menciptakan iklim tersebut (bila dibandingkan dengan SD Non-MBS). Rincian pertanyaan yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana gambaran umum iklim belajar demokratis yang dipersepsi murid SD? (2) seberapa besar variasi iklim demokratis antarsekolah? (3) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi iklim belajar demokratis berdasarkan persepsi murid di SD? (4) apakah terdapat suasana demokratis antarsekolah penerap MBS dan Non-MBS?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan survei dengan menggunakan rancangan hierarkis (*multilevel design*) berdasarkan asumsi dasar bahwa kondisi dan batas sosial, termasuk pendidikan, bersifat berjenjang-majemuk. Maksudnya, data dari siswa (sebagai level 1) dirangkaikan dalam konteks kelas (sebagai level 2), data kelas dirangkaikan ke dalam unit sekolah (level 3), dan seterusnya. Penelitian ini hanya menggunakan rancangan dua level karena setiap sekolah hanya memiliki satu kelas (dalam artian jenjang), sehingga level 2 dan level 3 menjadi datar atau setara.

Sebagai bagian dari rancangan multilevel, pada tahap pertama dibangun

null-model tempat perhatian dipusatkan pada data tentang iklim belajar demokratis, tanpa melibatkan variable eksplanatori yang independen. Dengan demikian tergambar analisis 1 talic (yang berlabel ganda) untuk mengetahui variasi pada setiap level sebelum melibatkan variabel independen.

Tahap kedua dari rancangan tersebut ialah memasukan sejumlah faktor yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap iklim belajar demokratis tersebut. Faktor yang diperhatikan untuk level 1 (berkaitan dengan siswa) ialah jender, usia, latar belakang status keluarga dan dukungan keluarga terhadap pembelajaran di sekolah. Faktor yang diperhatikan untuk level 2 (berkaitan dengan guru di kelas) ialah jender, usia, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja guru.

Tahap ketiga ialah memanfaatkan variabel signifikan pada tahap kedua sebagai pengontrol untuk mengestimasi effect size yang terjadi pada sekolah MBS (diciptakan variabel dummy: 1=MBS, 0=non-MBS). Tahap ini akan membantu peneliti agar mampu menyimpulkan apakah sekolah MBS sudah efektif atau sebaliknya dalam mengembangkan iklim demokratis di dalam lingkungannya.

Variabel-variabel penelitian ini dapat dioperasionalkan sebagai berikut: (a) Iklim belajar demokratis yaitu suasana yang menggambarkan interaksi aktif antara guru dan siswa dalam hal memberikan tanggapan kritis tanpa rasa takut, memiliki kebebasan menentukan pilihan, terciptanya suasana keteraturan dan berdiskusi dengan leluasa. Hal ini akan di ukur dengan menggunakan ISERP (*International School Effectiveness Research Project*) yang sudah divalidasi. (b) Level data: data dan variabel akan dibedakan menurut karakteristiknya antara variabel pada level siswa (level 1) dan

variabel pada level kelas (sebagai level 2). Perbedaan ini penting sejak tahap pertama sampai akhir dari desain penelitian. (c) Variabel yang berkaitan dengan siswa (untuk level 1): jender, usia, latar belakang status keluarga dan dukungan keluarga terhadap pembelajaran di sekolah. Variabel jender membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Variabel usia akan dielaborasi berdasarkan tanggal lahirnya ditransformasi ke usia berbasis bulan (bukan tahun). Status keluarga menggambarkan pendidikan dan pekerjaan orang tua (ayah dan ibu). Dibedakan jenjang pendidikan (dari SD sampai PT) dan pekerjaan (dikategorikan pekerja kasar tidak terampil, pekerja kasar terampil, pekerja profesional dan birokrat) dari kedua orang tua.

Dukungan keluarga dalam artian *Family constellation for learning*, berupa membantu pekerjaan rumah, membantu pekerjaan sekolah, dan memberikan imbalan terhadap prestasi belajar siswa. (d) Variabel yang berkaitan dengan guru (level 2); jender, usia, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. *Variabel gender* membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Usia guru ialah satuan tahun berdasarkan tanggal lahirnya. Latar belakang pendidikan guru membedakan antara pendidikan tertinggi dari SPG, Diploma, S1, S2, dan seterusnya. Pengalaman kerja dicerminkan dalam lamanya (berbasis tahun) bekerja sebagai guru. (e) Ciri atau status sekolah dibedakan antara sekolah MBS dan non-MBS (dummy: 1=MBS, 0=non-MBS). Sumber data untuk penelitian ini ialah para siswa di SD Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Sebagai sekolah eksperimen ialah gugus yang telah menerapkan MBS, sedangkan sebagai pengontrol diambil

sebuah gugus di kecamatan sama yang belum melaksanakan MBS.

DISKUSI

Keberhasilan MBS belum sempurna karena masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Dari ulasan terdahulu, tersirat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi masa depan MBS, khususnya dalam nuansa suasana demokratis. Faktor pertama ialah minat kepala sekolah dan guru terhadap inovasi. Belum tampak upaya konkret dari pihak guru di sekolah untuk rela berinovasi dalam proses belajar mengajar. Mereka masih terbelenggu oleh kekangan dari pusat lewat panduan Kurikulum 1994 beserta suplemennya dan khawatir dipersalahkan oleh pihak birokrat atasannya. Hal tersebut oleh Darmaningtyas (1999) dijuluki sebagai warisan rezim Orde Baru dalam pendidikan. Sikap demikian menghambat inovasi apapun yang diprakarsai dari luar.

Faktor kedua, beban kerja guru di sekolah. Umumnya, selain mengajar, guru dan kepala sekolah masih dijejali oleh sejumlah tugas tambahan yang menguras tenaga, perhatian, dan waktunya. Hal itu menyita peluang bagi guru untuk terlibat secara maksimal dalam berbagai program pembaharuan pendidikan di sekolahnya (World Bank, 1998; Jalal & Supriadi, 2001). Gejala ini diperparah oleh kondisi kesejahteraan guru sekolah dasar yang memaksa bekerja tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Faktor ketiga, ke depan, penerapan kebijakan otonomi daerah dan melemahnya posisi Departemen Pendidikan Nasional. Tampaknya kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak awal 2001 belum memberikan keleluasaan kepada sekolah. Kendali dan pengaruh pemerintah daerah terasa dominan dalam pengaturan hidup

matinya sekolah. Walau Depdiknas telah memperkenalkan manajemen berbasis sekolah (MBS), kenyataannya ialah manajemen berbasis daerah (Jalal & Supriadi, 2001), sehingga himbauan Depdiknas terasa lemah dan mudah disepelekan.

Faktor keempat, ketidakjelasan MBS untuk peningkatan mutu pendidikan di masa akan datang. Gagasan MBS diakrabkan dengan peningkatan mutu mulai bergema dari pusat sampai sekolah-sekolah tanpa refleksi dan petunjuk yang jelas. Pengalaman sejumlah negara gagal membuktikan kaitan antara MBS dan mutu pendidikan. Wacana ini mengandung dua unsur yang bergerak terpisah dengan tujuan dan makna yang berbeda. MBS diawali dari sekolah, sedangkan mutu pendidikan diawali dari prestasi individu siswa. MBS memperhatikan staf sekolah dan masyarakat, sedangkan mutu pendidikan cenderung memperhatikan siswa. Pada panduan Depdiknas kelihatan bahwa mata rantai antara MBS dan mutu pendidikan belum terbentuk secara operasional, masih retorika belaka. Kondisi demikian dapat menyurutkan minat dan perhatian sekolah terhadap kebanyakan upaya inovasi.

Faktor kelima, dana dan proporsi DAU (Dana Alokasi Umum) untuk pendidikan dalam situasi kritis. Uang bukan satu-satunya masalah dalam pengembangan pendidikan, tetapi dalam situasi krisis nasional saat ini, kondisi keuangan bukanlah kondisi sepele. Di beberapa daerah, gaji guru SD nyaris tidak dapat dibayarkan karena keterbatasan dana dan rendahnya DAU. Dalam situasi tersebut tidak banyak yang dapat diharapkan dari pihak guru yang berangsur-angsur lemas dan melupakan dulu inovasi.

Program MBS ini masih tergolong relatif baru di tanah air. Pengalaman berbagai inovasi pengembangan seperti ini di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan di tahun-tahun awal belum dapat dijadikan jaminan untuk keberhasilan pada tahun-tahun berikutnya. Sudah menjadi rahasia umum, para guru dan kepala sekolah akan kembali ke kebiasaan cara kerja yang dilakukan bertahun-tahun yang mungkin dapat dirasakan lebih pas bagi kondisinya saat ini. Umumnya para pelaku hanya bersemangat pada awal, kemudian semakin menurun pada tahun lanjutan. Dari temuan pada bagian terdahulu tampaknya ada sejumlah aspek intervensi yang belum berjalan mulus, walau tidak terungkap dengan sempurna, dapat menjadi kendala yang mendorong guru-guru di sekolah berbalik dari program ini. Kekurangmulusan itu antara lain meliputi aspek-aspek pembelajaran dan suasana kelas serta sekolah yang seharusnya kondusif. Unsur-unsur itu patut menjadi perhatian untuk diperbaiki pada tahun berikutnya demi kesinambungan program.

Pendidikan guru termasuk faktor yang mempengaruhi iklim belajar demokratis. Semakin tinggi tingkat pendidikan guru, akan semakin tinggi pula tingkat keprofesionalan dalam mengelola pembelajaran, termasuk menciptakan iklim pembelajaran demokratis. Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan guru semakin tidak mengesankan suasana demokratis. Hal ini menunjukkan adanya kontroversi antara keharusan dan kenyataan. Penelitian yang dilakukan memang belum mengungkap secara jelas apa yang menjadi penyebabnya. Ada beberapa dugaan, antara lain: (1) pendidikan yang ditempuh guru tidak

relevan dengan tugasnya sebagai guru SD, maka walau pendidikannya tinggi wawasan tentang pengelolaan pembelajaran di SD tetap rendah. (2) guru merasa dengan pendidikan yang dimiliki tidak layak lagi mengajar di SD sehingga perhatiannya terhadap siswa kurang. (3) guru sibuk dengan pekerjaan lain yang dianggap pantas dengan pendidikannya. (4) siswa SD sendiri merasa takut karena beranggapan guru tersebut terlalu tinggi kemampuannya.

Konsep pembelajaran efektif dalam program ini pada dasarnya menyentuh salah satu elemen kunci yang mempengaruhi mutu pendidikan di sekolah. Akan tetapi kelangsungannya tidak terlepas dari perkembangan kebijakan nasional yang berkembang dari waktu ke waktu. Idealisme guru kerap pupus lantaran kebijakan dari pusat yang menggiringnya kepada dilema antara pertumbuhan profesional dan cari makan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dicermati butir-butir pemikiran reformasi pendidikan untuk menangkap peluang pengembangan dalam program ini, dan kemungkinan kendala atau benturan yang dialami tahun-tahun mendatang.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa iklim demokratis pada sekolah MBS telah bersemi dan lebih berhasil di Kecamatan Ngantru yang berlatar belakang pedesaan dan pertanian. Dapat diperkirakan bahwa sekolah di sana haus dan ingin berpartisipasi dalam inovasi pendidikan. Dari kenyataan ini dapat dipelajari bahwa mungkin bagi daerah bukan pedesaan diperlukan pemikiran yang cermat dan program yang teliti sesuai dengan kondisinya sehingga dapat berhasil-guna semaksimal mungkin.

KESIMPULAN

Beberapa simpulan yang dapat ditarik dari analisis dan temuan yaitu (1) iklim demokratis di dalam kelas pada umumnya sedang-sedang saja, belum optimal tetapi tidak pula rendah. Namun demikian sekolah-sekolah yang menerapkan MBS menunjukkan skor yang agak lebih tinggi daripada sekolah lainnya. Dengan mencermati sebaran (deviasi baku) skor, ada tanda-tanda pada sekolah MBS berkembang gejala baru yang lebih menyebar luas ke arah positif; (2) variasi iklim demokratis, dari segi analisis jenjang, kelihatan bahwa porsi terbesar berada pada level siswa (70,6%) lalu diikuti level sekolah/ kelas (sebesar 29,4%). Oleh sebab itu faktor-faktor penjas yang terbanyak dan terutama kemungkinan berasal dari hal-hal yang terkait erat dengan siswa; (3) dibedakan antara faktor yang berkaitan dengan level siswa dan yang berkaitan dengan level sekolah/kelas. Faktor yang berarti pada level siswa ialah jender siswa, pendidikan ayah, dukungan belajar dari pihak keluarga. Faktor signifikan pada level sekolah/kelas yaitu jender guru, pendidikan guru, dan pengalaman mengajar; (4) setelah mengontrol faktor-faktor pada level siswa dan sekolah/kelas, ditemukan bahwa sekolah penerap MBS berbeda secara signifikan dengan sekolah Non-MBS. Hal ini mencerminkan isyarat keberhasilan MBS di dalam kelas walau masih terlalu prematur untuk ditempatkan pada konteks yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Creeers, B.P.M. 2000. Report of a One-day Discussion by Indonesian dan Dutch Experts: Basic Education Indonesia. Reflexie, 3 (2):13-19.

- Darmaningtyas . 1999. Pendidikan pada dan Setelah Krisis. Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Pengembangan Inisiatif Strategis untuk Transformasi (LPIST) dan Pustaka Pelajar.
- Degeng, I N.S. 2001. School-Based Management: Perwujudan Demokratisasi Belajar. Jurnal Gentengkali, 3 (9-10): 2-6.
- Delors, J. 1997. Learning the Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commision on Education for the Twenty-first Century. Paris: UNESCO.
- Depdiknas. 2000. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdik-nas.
- Goldstein, H. 1995. Multilevel Statistical Model. London: Edward Arnold, a division of Hodder Headline PLC.
- Iskandar, S. 2000. Implementation Completion Report-Indonesia: Primary Education Quality Improvement Project. Human Development Sector Unit, East Asia and Pacific Region- The World Bank.
- Jalal, F. & Supriadi, D. (Eds.). 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kaluge, L. 2001. Analisis Multilevel dalam Penelitian Pendidikan. Forum Penelitian, 13 (1): 1-16.
- Kaluge, L. 2003. Validasi Dimensi Sikap Akademik, Konsep Diri, Suasana Demokratis, dan Kendali Diri pada Murid SD. Paedagogia, 6 (2): 201-204.
- Mulyoto. 30 September, 2002. Pembelajaran yang Demokratis. Kompas, hlm 9.
- Sadiyo. 2003. Sumbangan Pendidikan dalam Pembangunan Demokrasi. Jurnal Ilmu Pendidikan, 10 (1): 25-28.
- Samani, M. 2001. Manajemen Berbasis Sekolah: Manajemen Pendidikan untuk Memberdayakan Sekolah. Media Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 24 (7): 145-154.
- Surakhmad, W. 20 November, 2001. Kembalikan Pendidikan pada Masyarakat. Kompas, hlm. 10.
- Umaedi. 2001. School-Based Management: a lesson learned from Indonesia. Makalah yang disajikan pada UNESCO Sub-Regional Training Worksoop: Decentralizing Basic Education for Qualiyy Improvement-Toward School-Based Management and community Participation, Bandung 10-12 Oktober.
- World Bank. 1998. Education in Indonesias: From Crisis to Recovery. Washington, D.C: Education Sector Unit, East Asia and Pacific Regional Office.